

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki ribuan pulau tersebar di seluruh wilayah dengan karakteristik yang berbeda setiap pulauanya, perbedaan ini menjadi hal yang lumrah melihat kondisi geografis yang ada, bahkan hal ini mampu mempengaruhi perbedaan pembangunan ekonomi. Keberagaman ini memicu pertumbuhan wilayah untuk berkembang, beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat namun beberapa lainnya mengalami pelambatan dalam pertumbuhannya. Kemampuan perkembangan yang berbeda setiap daerah ini kemudian memicu ketimpangan yang terjadi, ketimpangan pembangunan atau biasa disebut sebagai disparitas merupakan hal yang biasa terjadi karena perbedaan pemerataan pembangunan. Ketimpangan yang tidak merata menimbulkan masalah yang kompleks seperti masalah sosial, politik, kependudukan, lingkungan dan dapat mengakibatkan kerugian dalam pencapaian pembangunan yang ingin dicapai (Anggraini, Ridhani, and Setiawan 2024).

Menurut Todaro dan Smith (2012) pembangunan ekonomi harus terarah pada efisiensi (*efficiency*), keberlanjutan (*sustainability*) dan pemerataan (*equity*) agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi yang merata merupakan tujuan semua negara agar mencapai kesejahteraan. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7, Allah SWT. berfirman:

﴿ مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
 وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
 عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ ﴾

Artinya; “Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota. Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

Dalam surah ini dijelaskan jika harta harus beredar secara merata agar tidak tertumpuk di satu kalangan saja dan dilakukan secara merata, sama halnya dengan tingkat ekonomi yang ada di setiap wilayah Indonesia (Huda 2018). Pentingnya pembangunan ekonomi sebagai langkah-langkah perubahan dalam struktur ekonomi sebagai perubahan yang lebih multidimensional yang melibatkan semua aspek kehidupan agar pembangunan lebih holistik. Pembangunan ekonomi digambarkan sebagai sebuah proses meningkatnya pendapatan rata-rata per kapita dalam sebuah negara, dengan melihat pertumbuhan yang terjadi dari waktu ke waktu pada indikator Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat wilayah (Karmini et al. 2022).

Perbedaan pembangunan ekonomi antar daerah salah satunya dipengaruhi oleh struktur sektor ekonominya. Pada tahun 2024 berdasarkan data dalam laporan Badan Pusat Statistik Indonesia (2024) struktur perekonomian Indonesia didominasi oleh sektor sekunder dan tersier dibanding sektor primernya. Pada tingkat regional, khususnya kabupaten/kota, struktur ekonomi dapat menunjukkan

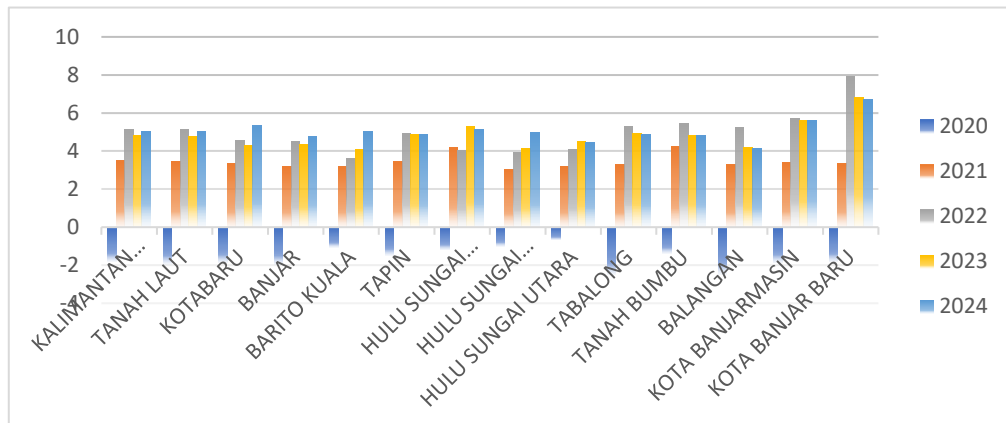
pola yang berbeda, di mana sektor primer masih menjadi penopang utama perekonomian. Perbedaan ini semakin menguat seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi lokal (Pemerintah Republik Indonesia 2014). Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi daerah menjadi penting agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap sektor-sektor ekonomi yang berkembang maupun yang mengalami kejenuhan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tersebar di seluruh wilayah salah satunya, pulau Kalimantan yang terkenal dengan sektor pertambangan yang melimpah tercatat menyumbang 82% atau sekitar 687 juta ton produksi batu bara nasional tahun 2024. Kalimantan Selatan adalah salah satu yang terbesar dengan menyumbang sekitar 237 juta ton (Syarawie 2025). Terhitung selama 5 tahun berturut-turut sektor pertambangan masih mendominasi dengan mengambil porsi kurang lebih sekitar 26,42% ekonomi di Kalimantan Selatan (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan 2025).

Kekayaan alam yang dimiliki ini harusnya mampu menciptakan percepatan pembangunan yang berkesinambungan dan merata bagi wilayah-wilayah di Kalimantan Selatan. Namun, tidak semua daerah memiliki sumber daya serupa, perbedaan karakteristik ekonomi di setiap wilayah Kalimantan Selatan memiliki perbedaan, untuk itu pembangunan dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan

yang ada melalui analisis tingkat pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah data pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Gambar 1. 1. Data Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025.

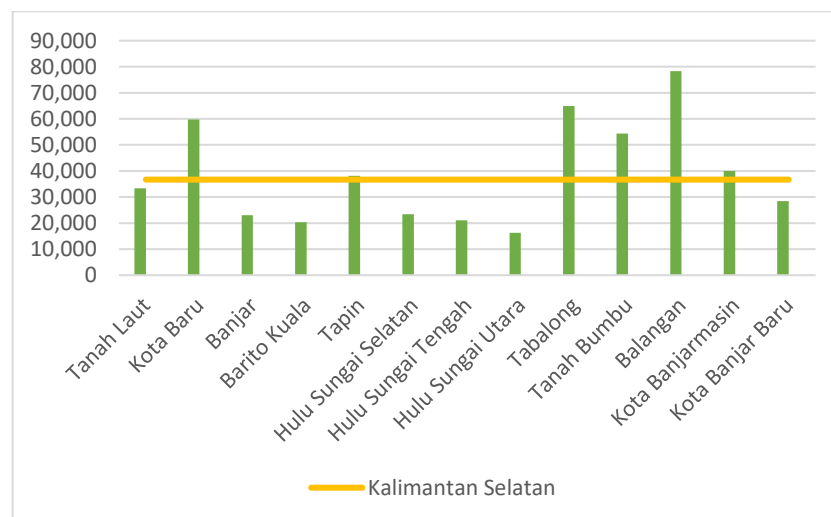
Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Selatan, pertumbuhan ekonomi regional menunjukkan pola pemulihan yang konsisten pasca kontraksi akibat pandemi di tahun 2020. Pada periode 2020-2024, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan meningkat dari -1,82% menjadi 5,05%, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 3,33%. Dilihat dari keseluruhan kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan pertumbuhan HST masih berada di bawah rata-rata provinsi pada setiap tahunnya, mencerminkan tantangan struktural yang dihadapi oleh wilayah non-pertambangan dalam mengejar ketertinggalan. Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) sebagai objek penelitian juga mengikuti tren pemulihan ini, dengan pertumbuhan yang meningkat dari -1,01% di tahun 2020 menjadi 4,95% di tahun 2024.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata

5,7-6,0 persen per tahun (Bappenas Republik Indonesia 2024). Namun, realisasi di tingkat provinsi menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan rata-rata tumbuh 3,33% selama periode tersebut, sementara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tumbuh rata-rata 2,99%, keduanya masih di bawah target nasional. Kesenjangan antara target nasional dengan realisasi regional ini mengindikasikan adanya tantangan struktural dan kontekstual dalam implementasi pembangunan di tingkat daerah, khususnya bagi kabupaten seperti HST yang tidak mengandalkan sektor ekstraktif dominan seperti pertambangan batu bara.

Dinamika struktur ekonominya tetap menunjukkan perbedaan karakter dibandingkan kabupaten lain di Kalimantan Selatan yang didominasi pertambangan. Salah satunya dapat dilihat dari perbandingan PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) yang digambarkan pada grafik berikut.

**Gambar 1. 2. PDRB per Kapita ADHK 2010 Kalimantan Selatan
Tahun 2024**



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025.

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat perbandingan PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, di mana terdapat perbedaan yang cukup mencolok antarwilayah. Kabupaten Balangan, Tabalong, dan Kotabaru menempati posisi dengan PDRB per kapita tertinggi, yang sebagian besar ditopang oleh dominasi sektor pertambangan, khususnya batu bara sebagai komoditas unggulan daerah. Sebaliknya, beberapa kabupaten yang struktur ekonominya lebih bertumpu pada sektor non-ekstraktif seperti daerah Hulu Sungai Tengah yang bertumpu pada pertanian dan jasa menunjukkan PDRB per kapita yang relatif lebih rendah serta masih berada di bawah rata-rata provinsi, sehingga kontribusi nilai tambah per kapitanya tidak setinggi daerah berbasis tambang. Perbedaan ini mencerminkan adanya kesenjangan ekonomi antarwilayah, terutama antara kabupaten yang memiliki basis pertambangan dan kabupaten yang struktur ekonominya lebih homogen dan tidak didominasi sektor ekstraktif.

Dalam konteks teori *growth pole* yang dikemukakan oleh Perroux (1955) dikutip dalam tulisan (Kisiała and Suszynska 2017) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu yang memiliki sektor unggulan sebagai penggerak utama. Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak termasuk dalam pusat pertumbuhan berbasis pertambangan yang berkembang di Kalimantan Selatan, Ketiadaan aktivitas tersebut bukan hanya disebabkan faktor sumber daya, tetapi juga karena masyarakat HST secara tegas menolak kegiatan pertambangan (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2024). Kondisi ini menyebabkan struktur ekonomi HST

berkembang dengan pola yang berbeda dibandingkan kabupaten lain yang bertumpu pada sektor ekstraktif.

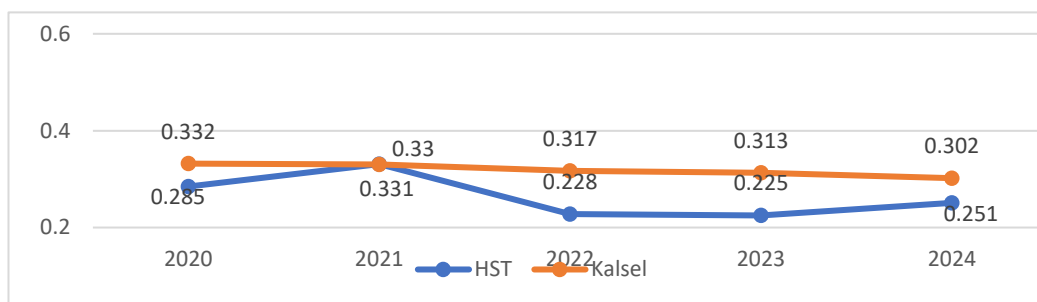
Meskipun demikian, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki posisi strategis sebagai pusat pelayanan dan aktivitas ekonomi kawasan Banua Anam. Peran HST sebagai pusat perdagangan, jasa, dan distribusi hasil pertanian bagi wilayah sekitarnya menjadikan daerah ini sebagai simpul pertumbuhan ekonomi non-pertambangan. Beberapa kajian menyebutkan bahwa Barabai sebagai ibu kota HST berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pelayanan publik bagi kabupaten-kabupaten di wilayah Hulu Sungai, sehingga memiliki peran penting dalam jaringan ekonomi regional (Nawwar et al. 2023). Karakter ini menjadikan HST menarik untuk dikaji sebagai contoh wilayah pusat pertumbuhan berbasis sektor non-ekstraktif.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang memiliki luas wilayah sekitar 1.771 km² dengan jumlah penduduk mencapai 268.360 jiwa. Dikutip dari laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah (2025) struktur perekonomian HST masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 23,07% pada tahun 2023 terhadap total PDRB, sementara sektor industri dan jasa relatif kecil. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di HST tercatat sebesar Rp34,85 juta rupiah, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi sebesar Rp 60,21 juta rupiah. Selain itu, HST memiliki tingkat kemiskinan sebesar 5,03% angka ini menjadi yang tertinggi dibanding daerah lain yang ada di Kalimantan Selatan.

Pada tahun 2023 tercatat tersisa dua desa tertinggal di Provinsi Kalimantan Selatan yang ada di kabupaten ini yaitu Desa Juhu dan Desa Aing Bantai di

Kecamatan Batang Alai Timur namun pada tahun 2024 sudah tidak lagi ditemui desa tertinggal (Jamaluddin 2024). Namun, pencapaian administratif tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang substansial. Hal ini terlihat dari distribusi pendapatan yang dapat diukur melalui perbandingan tren Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2020-2024, sebagaimana ditampilkan dalam di bawah ini.

Gambar 1. 3. Data Gini Rasio HST dan Kalimantan Selatan tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025.

Secara umum, nilai Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) selama periode 2020–2024 berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan, yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan relatif lebih rendah. Namun demikian, perkembangan Gini Ratio HST menunjukkan dinamika yang fluktuatif, di mana terjadi peningkatan ketimpangan dari tahun 2021, kemudian menurun pada periode 2022–2023, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 0,251. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun ketimpangan pendapatan di HST tergolong rendah, disparitas pendapatan tetap menjadi isu yang relevan untuk dikaji karena menunjukkan kecenderungan perubahan dan potensi peningkatan dari waktu ke waktu.

Di sisi lain, ketimpangan yang relatif rendah tersebut belum diikuti oleh capaian kesejahteraan yang optimal, tercermin dari rendahnya PDRB per kapita dan masih tingginya tingkat kemiskinan di HST, sehingga permasalahan utama pembangunan daerah tidak hanya terletak pada distribusi pendapatan, tetapi juga pada keterbatasan kapasitas dan struktur ekonomi wilayah, yang perlu dianalisis lebih lanjut melalui kajian peran sektor basis untuk mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

Adanya ketergantungan yang tinggi di Hulu Sungai Tengah pada sektor primer sehingga menjadikan perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan keterbatasan produktivitas. Selain itu, disparitas antarwilayah juga berpotensi semakin lebar apabila sektor basis tidak mampu mendorong pertumbuhan sektor lain. Pemetaan sektor ekonomi menjadi penting untuk mengidentifikasi sektor basis dan non basis yang berpotensi dikembangkan guna membentuk struktur perekonomian yang lebih seimbang dan berkelanjutan, mengingat pertumbuhan ekonomi yang ideal memerlukan kontribusi dari berbagai sektor untuk mendorong efek pengganda dan menekan ketimpangan wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Sejalan dengan penelitian oleh Arif Maulana (2021) menunjukkan bahwa perekonomian HST sangat bergantung pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Penelitian lain terkait potensi ekonomi dan disparitas di Kalimantan Selatan menunjukkan hasil yang beragam, di antaranya penelitian Yusuf Asyahri (2024) menunjukkan adanya tujuh sektor basis dan potensial di Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara itu, Moch Andrian Kurniawan (2025) menemukan

bahwa struktur ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan bersifat tidak merata, di mana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mendominasi wilayah perdesaan, sementara sektor jasa dan perdagangan terkonsentrasi di wilayah perkotaan,

Meskipun penelitian sebelumnya telah mengkaji potensi sektor ekonomi dan tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum, kajian yang secara spesifik mengintegrasikan analisis sektor basis dan ketimpangan wilayah pada tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi potensi sektor basis serta keterkaitannya dengan ketimpangan wilayah sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan dengan mengisi kesenjangan tersebut sebagai pembaruan dalam penelitian dan melakukan analisis yang lebih komprehensif melalui penggunaan *Location Quotient (LQ)*, *Dynamic Location Quotient (DLQ)*, *Tipologi Klassen*, *Shift Share* untuk melihat potensi sektor ekonomi, serta *Indeks Williamson* untuk menilai ketimpangan wilayah. Dengan cakupan analisis yang lebih luas, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait potensi sektor ekonomi sekaligus bagaimana ketimpangan yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan tinjauan untuk melihat sektor unggulan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan disparitas ekonomi yang terjadi. Penelitian ini akan berfokus pada PDRB tahun 2020-2024 karena tahun ini merepresentasikan fase yang krusial dalam dinamika pembangunan ekonomi, yaitu masa kontraksi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 hingga fase pemulihan ekonomi pada tahun-tahun berikutnya. Periode

ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perubahan struktur ekonomi daerah, baik dari sisi pertumbuhan sektoral maupun distribusi pembangunan antarwilayah yang hasilnya akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir yang berjudul. “Potensi Sektor Ekonomi dan Disparitas Pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, fokus utama permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja sektor-sektor unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ?
2. Seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, fokus utama permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi sektor unggulan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Untuk menghitung tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, tidak hanya bagi peneliti tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan baik secara teoretis, praktis, dan akademis.

1. Manfaat Teoretis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi wilayah, khususnya yang berkaitan dengan teori sektor basis dan ketimpangan wilayah. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman konseptual mengenai peran sektor basis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta keterkaitannya dengan ketimpangan wilayah, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah literatur ilmiah dan menjadi referensi akademik, terutama di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Manfaat Praktis : Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan para pemangku kepentingan terkait mengenai potensi sektor-sektor basis serta implikasinya terhadap ketimpangan wilayah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih terarah, efektif, dan berkeadilan antarwilayah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Manfaat Akademis : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan akademis dan kerangka analitis bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan analisis sektor basis, pertumbuhan ekonomi daerah, dan ketimpangan wilayah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan dengan fokus wilayah Kabupaten Hulu

Sungai Tengah maupun daerah lain yang memiliki karakteristik ekonomi serupa, serta pengembangan metode dan variabel penelitian yang relevan.